

REPRESENTASI POLITIK TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

Abror

Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

E-mail: abrorsip5@gmail.com

ABSTRACT

The legislative election of Bandar Lampung cannot be separated from the involvement of community organizations. In this case, Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU). This study aims to determine the political representation of the Leader of Muhammadiyah and NU in the legislative elections in Bandar Lampung in 2019. This study uses descriptive qualitative methods. In this study, there are 3 theories used, namely (1) symbolic representation (cultural representation), this can be seen from the Leader of Muhammadiyah who have cultural similarities with Partai Amanat Nasional (PAN) and NU with Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (2) descriptive representation, which represents and is represented includes community and gender equality. in Muhammadiyah represented by Aisyiyah, while NU are represented by Fatayat NU and Muslimat NU; (3) substantive representation (fighting for the interests represented in the public sphere), PAN is fighting for regional regulations on the system of fostering small and medium businesses called syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) which is managed by Muhammadiyah. Mean while, PKB legislative members helped raise NU in activities carried out by NU leaders / cadres in the public sphere such as Istighosah.

Keywords: Representation, Muhammadiyah and NU, Legislature

ABSTRAK

Pemilihan legislatif Kota Bandar Lampung tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan organisasi masyarakat. Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Penelitian ini bertujuan mengetahui representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, Ada 3 teori yang digunakan yaitu (1) *symbolic representation* (adanya keterwakilan kultur), hal ini dapat dilihat dari tokoh Muhammadiyah yang mempunyai persamaan kultur dengan partai amanat nasional (PAN) dan tokoh NU dengan partai kebangkitan bangsa (PKB); (2) *descriptive representation* (tingkat kemiripan), yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan komunitas dan *gender*. di Muhammadiyah diwakili Aisyiyah, sedangkan NU diwakili Fatayat NU dan Muslimat NU; (3) *substantive representation* (memperjuangkan kepentingan yang di representasikan dalam ranah publik), PAN memperjuangkan peraturan daerah tentang sistem pembinaan usaha kecil menengah yang bernama syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang di kelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu anggota legislatif PKB membantu membesarkan NU dalam kegiatan yang di laksanakan tokoh/kader NU di ranah publik seperti Istighosah.

Kata Kunci : Representasi, Muhammadiyah dan NU, Legislatif.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) adalah dua organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah - ijtima'iyah*) terbesar di negara ini. Organisasi tersebut lebih fokus menangani persoalan - persoalan kehidupan sosial keagamaan para warganya, akan tetapi dalam sejarahnya yang panjang, kedua organisasi ini juga telah ikut mewarnai dan terlibat dalam "kehidupan politik" pada era orde lama. NU bahkan sempat memutuskan menjadi partai politik setelah sebelumnya merasa dikecewakan oleh kelompok modernis yang mendominasi, meskipun pada organisasi ini akhirnya kembali ke cita-cita awal pendiriannya.

Organisasi ini merupakan dua organisasi masa Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi negara ini. Berbagai pandangan, sikap dan kebijakan yang di ambil oleh kedua organisasi tersebut terbukti mampu mewarnai kehidupan politik negara ini dan juga ikut menyumbangkan proses pendewasaan para warganya dalam berdemokrasi (Asyari, 2010).

Fakta itu semakin tampak pada saat Muhammadiyah dan NU membuat kebijakan yang longgar bagi warganya untuk menentukan pilihan politiknya yaitu pada pemilu 1999 dan 2004. Pada kebijakan politik Muhammadiyah dan NU yang tidak memaksakan warganya untuk memilih partai tertentu, termasuk partai partai yang lahir atau minimal berafiliasi dengan keduanya, telah memberikan ruang yang luas bagi warganya untuk menentukan sikap dan pilihan politiknya sendiri tanpa adanya tekanan dan apalagi ancaman dari induk organisasinya.

Setelah runtuhnya rezim orde baru, yang kemudian populer dengan sebutan era reformasi, banyak ilmuwan

dan tokoh dari berbagai kalangan tertarik memasuki dunia politik, tidak terkecuali tokoh-tokoh penting dari organisasi organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU. Pada masa ini, banyak tokoh Muhammadiyah dan NU yang bukan hanya terjun ke dunia politik, organisasi tersebut mendorong dibentuknya partai politik yang menjadi representasi dari atau berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan yang mereka anut, oleh karna itu, tidak heran jika kemudian lahir Partai Amanat Nasional (PAN). Yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di lahirkan oleh tokoh-tokoh NU (Asyari, 2010).

Perkembangan konsep representasi sejak masa Thomas Hoobes hingga Hana Pitkin, yang justru memperlihatkan beragamnya pandangan dan terkadang bertolak belakang dalam menjelaskan relasi antara demokrasi dan representasi. Hal ini dikarenakan fondasi filosofis dari kedua konsepsi tersebut cenderung bertolak belakang serta sejarah kemunculan kedua konsep tersebut berbeda (Suseno 2013). Representasi politik secara sederhana di ilustrasikan oleh Hana Pitkin, ilmuwan politik pelopor studi tentang relasi antara konstituen dan politikus kontemporer, sebagai "*acting in the best interest of the public*" (Djani, 2017).

Pitkin pula yang mengangkat ambiguitas relasi antara konstituen dan wakil politik akibat dari apa yang ia bahasakan sebagai 'menghadirkan yang tidak hadir' (*presence but absence*) dalam pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan pandangan ini, studi yang dilakukan oleh Puskapol Universitas Indonesia (2013) melihat representasi politik, relasi antara pejabat publik terpilih dengan konstituen, kerap dijumpai dalam ikatan yang samar-

samar, ambigu dan tidak jarang kontradiktif.

Berbeda dengan pandangan di atas, tulisan ini berargumen bahwa representasi politik terbentuk dari relasi dan interaksi antara konstituen dan politikus secara timbal balik dalam kurun waktu tertentu karenanya membentuk ikatan yang tidak hanya bertumpu pada relasi formalistik. Stokke dan Selboe (2009) mengkritik pemahaman Pitkin terhadap representasi yang cenderung statis dan bertumpu pada konstituen (*society-centric*) di mana identitas dan kepentingan yang direpresentasikan oleh wakil politik dianggap terbentuk secara obyektif berdasarkan persepsi konstituen. Lebih lanjut mereka berargumen bahwa representasi politik adalah produk sekaligus produsen atas diskursus antara identitas dan pandangan optimis.

Berdasarkan konsepsi teori peran, penulis mencoba untuk menganalisa penelitian ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan Soekanto (2002) tentang unsur-unsur peranan yang meliputi aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Namun dari ke empat unsur tersebut hanya menggambarkan keadaan secara sosiologis. Sedangkan dalam menjawab rumusan masalah maka yang lebih relevan penulis akan menggunakan teori tentang representasi politik milik Wängnerud (2009) yaitu *symbolic representation*, *descriptive representation*, *substantive representation*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nawawi (1991) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Iskandar (2008) ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah (1) peneliti terlibat secara langsung dengan *setting* sosial penelitian, (2) bersifat deskriptif, (3) peneliti merupakan instrumen utama.

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan sd dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2011), dan melibatkan tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, Sekretaris Muhammadiyah, Pengurus NU, Pengurus DPD PAN Kota Bandarlampung, Pengurus DPD PKB Kota Bandarlampung.

Teknik pengolahan data yaitu *editing*, pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang telah masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan (Hasan, 2002). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum seluruh *stakeholder* memiliki peran penting dalam pemilihan anggota legislatif, begitupun pemilihan anggota legislatif Kota Bandar Lampung, *stakeholder* tersebut bisa berupa perkumpulan masyarakat ataupun representasi politik, dalam hal ini representasi politik yang menjadi objek pertama penelitian adalah tokoh Muhammadiyah dan NU, tokoh Muhammadiyah dan NU memiliki tanggung jawab yang sama dengan

stakeholder yang lain, artinya memiliki peran dalam pemilihan anggota legislatif Kota Bandar Lampung khususnya.

Untuk pemilu legislatif, himbauan Muhammadiyah berbunyi sebagai berikut: “*Lembaga legislatif dan sistem politik indonesia selama era reformasi harus menjadi faktor check and balance terhadap eksekutif, dan juga harus menjalankan fungsi-fungsi politik demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, anggota legislatif di DPR, DPRD, dan DPD harus benar-benar yang bertanggung jawab, bermoral, mempunyai visi dan kemampuan yang tinggi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rill rakyat*”.

Sehubungan dengan hal ini, Muhammadiyah mendesak semua warga Muhammadiyah untuk :

1. Memilih calon legislatif yang benar-benar memiliki kualitas moral (*akhlaq*) yang tinggi, tanggung jawab, cakap, dan misi yang berkualitas serta komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan suatu misi Muhammadiyah yaitu demi kepentingan *ummat* dan bangsa;
2. Memilih calon legislatif dan partai politik yang bisa memberikan kesempatan langsung dan besar untuk memilih kader terbaik Muhammadiyah;
3. Memilih calon anggota DPD dari Muhammadiyah yang dapat direkomendasikan dan mewakili mayoritas aspirasi masing-masing daerah;
4. Memilih calon legislatif perempuan yaitu dari Muhammadiyah;
5. Tidak memilih calon legislatif yang bermasalah dan terlibat dalam kasus-kasus amoral, korupsi, pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran terhadap

kepentingan rakyat dan masalah-masalah hukum.

Ada beberapa poin penting yang bisa di ambil dari panduan politik Muhammadiyah di atas. Pertama, Muhammadiyah bermaksud mendidik para warganya tentang bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam proses demokratisasi saat ini. Meskipun dokumen tersebut bersifat panduan resmi, hal itu tidak menyebutkan sanksi organisasi apapun bagi mereka yang tidak mematuhi. Kedua, sebagai organisasi keagamaan dengan sejumlah besar pengikut, Muhammadiyah ingin berpartisipasi dalam proses demokratisasi di Indonesia dengan cara mendapatkan kekuasaan politik tanpa menjadi sebuah partai politik belajar dari pengalaman pada tahun 1950-an ketika Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi yang menjadi pelajaran politik yang baik bagi organisasi sosial keagamaan ini (Asyari, 2010).

Para pemimpin, aktivis, dan politisi NU di luar jawa terbagi ke dalam dua kelompok utama dalam merespon panduan dan sikap politik NU pada umumnya pada pemilu. Kelompok pertama dapat di gambarkan sebagai penganut *khittah* yang fanatik. Para pendukung kelompok ini adalah pembela sejati nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Mereka di katagorikan sebagai penganut fanatik *khittah* karna mereka membuat segala usaha yang memungkinkan untuk memisahkan NU dari partai-partai politik, termasuk PKB.

Seperti yang di utarakan Hasyim Aidid dari NU Sulawesi Selatan menyatakan:

“Politisi NU dapat memainkan peran partai politik apa pun yang mereka inginkan. Sekarang mereka melibatakn diri dalam Golkar, PPP, dan PDI-P. Jadi biarlah mereka berkompetisi

secara individu. Ada sisi positifnya. Mereka masih bisa ingat dengan ke-NU-an mereka, tetapi bebas dalam berpolitik. Saya sendiri boleh jadi tidak memilih PKB. Sekarang kita bisa lihat bahwa NU secara formal bersikap fleksibel dalam politik. tidak seorangpun biasa menyuruh kita untuk melakukan hal ini atau itu. Di parlemen politisi NU tidak boleh hanya berbicara untuk kepentingan NU, tetapi mereka harus berbicara demi kepentingan negeri, kemanusiaan. Jadai kalau salah harus katakan salah. Korupsi harus di berantas, pendidikan harus di majukan dan militerisme harus di hentikan. Jadi, politisi NU dari bermacam partai politik bisa bertemu di parlemen dan membicarakan isu-isu ini. Kita tidak bisa hanya bergantung pada PKB, tetapi juga partai-partai politik lain yang juga di wakili politisi NU”.

Sejalan dengan pandangan Hasyim Aidid, Aminuddin, Katib Syuriyah NU Sulawesi Selatan juga menyatakan :

“Kami memberikan kebebasan kepada warga NU. Mereka bebas mengekspresikan aspirasi politik mereka sesuai dengan hati nurani mereka sehingga hasilnya bisa bermacam-macam. Politisi NU bergabung dengan hampir setiap partai politik bukan hanya PKB”.

Kelompok kedua dapat digambarkan sebagai ‘petualang politik’ NU. Bisa disebut demikian mereka cenderung memanfaatkan nama NU demi memperoleh dukungan dari warga NU salah satu contohnya adalah Jamhuri, seorang calon anggota legislatif dari

Kalimantan Selatan, yang menyatakan selama kampanye dia menjelaskan kepada peserta pengajian bahwa PKB adalah sebuah partai yang didirikan oleh NU dan oleh karenanya warga NU harus memilih partai ini. Contoh lain adalah Majdi, merupakan Sekertari PKB Jambi mengungkapkan:

“Ya, PKB didirikan oleh NU, semua fungsionarisnya adalah NU. Kami mempromosikan kepentingan NU. Oleh karenanya, warga NU seharusnya memilih para calon dari NU dengan memilih PKB, itu yang saya maksud pilihlah orang kita”.

Pernyataan tersebut tampak jelas bahwa peran politik NU dalam transisi demokrasi Indonesia sekarang ini bukanlah untuk mencari kekuasaan dengan mendukung partai-partai politik yang terasosiasi dengannya, melainkan bagaimana menjadikan seluruh proses pemilihan legislatif berjalan lancar dan demokratis (Asyari, 2010)

Peran representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019 dapat di lihat dari tiga aspek representasi politik, yaitu *symbolic representation* dengan adanya keterwakilan kultur, hal ini dapat dilihat dari tokoh Muhammadiyah yang mempunyai persamaan kultur dengan PAN dan tokoh NU dengan PKB. *Descriptive representation* dibuktikan dengan tingkat kemiripan, yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan komunitas dan *gender*. Di Muhammadiyah di wakili Aisyiyah, sedangkan NU di wakili Fatayat NU dan Muslimat NU. Serta *substantive representation* yang dibuktikan dengan Memperjuangkan kepentingan yang di representasikan dalam ranah publik, PAN memperjuangkan peraturan daerah tentang sistem pembinaan usaha kecil

menengah yang bernama syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang di kelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu anggota legislatif PKB membantu membesarkan NU dalam kegiatan yang di laksanakan tokoh/kader NU di ranah publik seperti Istighosah.

PENUTUP

Peran representasi politik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2019 dapat di lihat dari tiga aspek representasi politik, yaitu *symbolic representation*, *descriptive representation* dan *substantive representation*.

Anggota Legislatif dalam hal ini wakil rakyat terpilih, sebagai anggota kader Muhammadiyah ataupun NU, selain mengutamakan kepentingan dan merepresentasikan organisasi karna alasan historis, ideologi, visi dan Misi dalam hal ini Muhammadiyah dan NU, diharapkan mampu merepresentasikan hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat, bersikap adil dan bijaksana dalam segala urusan legislasi, anggaran dan membuat peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, S. (2010). *Nalar Politik NU & Muhammadiyah*. Yogyakarta: LkiS
- Djani, L. (2017). Representasi Politik: Relasi Imaginer konsituen dan Politikus. Diakses dari <http://insistive.org/wp-content/uploads/2017/09/Representasi-Politik-Relasi-Imaginer>.(29 November 2019, Pukul 10.15 WIB).
- Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iskandar. (2008). *Metodologi Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Stokke, K., & Selboe, E. (2009) *Symbolic Representation as Political Practice dalam Törnquist O., Webster N., Stokke K. (eds) Rethinking Popular Representation*. Palgrave Macmillan, New York: Palgrave Studies in Governance, Security, and Development.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.